

Sebuah Ujian Bagi Anggota DPR

Mereka yang di “Senayan”, mestinya duduk sebagai “wakil rakyat”. Artinya, begitu mereka masuk di sebuah lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlokasi di Senayan itu, seharusnya benar-benar mewakili rakyat,¹ mau menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa pilih-pilih apakah rakyat tersebut konstituennya atau bukan, kelompoknya atau bukan, koleganya atau bukan, kroninya atau bukan, dan seterusnya. Meskipun riwayat masuk ke “Senayan” itu memang harus melalui perolehan dukungan rakyat, itu adalah sekedar proses. Sehingga tidak berarti hanya kepentingan rakyat yang memilihnya saja, pendukungnya saja, atau konstituennya saja yang harus memperoleh perhatiannya.

Korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dengan segala keterbatasannya aktif melakukan penuntutan, seharusnya mendapat respon positif di mata anggota DPR. Status korban yang adalah pihak yang dirugikan dan menderita, yang selalu menuntut diselesaikannya kasus secara tuntas demi terungkapnya kebenaran dan terwujudnya keadilan, seharusnya mendapat tempat tersendiri di hati para anggota DPR - dipahami aspirasinya dan diperjuangkan tuntutannya. Seharusnya pula, anggota DPR sebagai wakil rakyat, peka dan mampu serta mempunyai niat untuk menyerap substansi dari suatu kasus pelanggaran HAM, dan bukan malah abai terhadap substansi dan berusaha menghindar atau justru mempertontonkan kedangkalan nuraninya.

Pada medio bulan ini, Maret 2007, kita telah menyaksikan bagaimana sebagian besar wakil rakyat yang berkantor di “Senayan” itu telah menunjukkan arogansinya. Di balik senyum simpul para pelaku pelanggaran HAM, sebagian besar anggota DPR itu telah berhasil menjadi “bumper” tangguh bagi pelaku pelanggaran HAM, setelah berhasil mengulur-ulur waktu dengan berlindung di balik *procedural oriented*, mekanisme formal lembaga, tata-tertib DPR, dan sebagainya.

Korban memang lemah, tidak memiliki posisi tawar yang kuat di tengah kebengalan sikap dan posisi para anggota DPR. Korban memang tidak mampu (tidak mau) memberikan janji-janji prospektif kepada anggota DPR, apalagi yang bersifat materiil. Korban amat menyadari bahwa korban bukanlah “penguji” bagi mereka, melainkan secara tak sengaja telah menyuguhkan hamparan “menu uji”, dan publik-lah, rakyat-lah, yang berwenang untuk menguji mereka.

Pemberitaan yang begitu besar di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, mengenai tuntutan penuntasan kasus pelanggaran HAM, adalah sebuah indikasi begitu kuatnya tuntutan masyarakat akan terungkapnya kasus-kasus pelanggaran HAM, kendatipun anggota DPR tetap saja menutup mata. Terluputnya dan tersiarnya oleh media massa tentang sikap sejumlah Fraksi di DPR yang ingin menutup suatu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu **Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi** (yang menunjukkan sikap partai di belakangnya), **adalah merupakan “DOKUMEN PUBLIK” yang telah memberikan informasi sekaligus masukan kepada masyarakat luas mengenai partai mana saja yang tidak pantas dipilih pada Pemilu 2009 yang akan datang, karena telah teruji tidak mengindahkan penegakan HAM dan bahkan menjadi bumper bagi pelaku pelanggaran HAM. *****

¹ Rakyat yang dimaksud adalah dalam pengertian positif, yaitu rakyat yang bukan pencuri, bukan kriminal, bukan koruptor, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku pelanggaran HAM dan seterusnya.